

# RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TAPIN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat diselesaikan.

RENJA ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan mengacu kepada RENSTRA SKPD dan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dengan harapan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin yaitu **"Terwujudnya Moda Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan di Kabupaten Tapin"**.

Pada kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini. Semoga RENJA ini dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

Rantau,      Juni 2023  
Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tapin

Drs. MUHAMMAD NOR, M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710910 199101 1 001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka pendek atau satu tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan dengan berpedoman dengan Renstra SKPD. Dengan demikian Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026 yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.



## 1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program dan kegiatan, memuat kebijakan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;



2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
3. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara secretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Terdapat 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visinya yaitu : **"Terwujudnya Moda Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan di Kabupaten Tapin"**. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.9.614.946.588,00 dapat terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. Rp.7.662.569.232,00 atau 79,69%. Berikut ini adalah realisasi program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2022 :

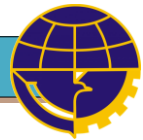
**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.252.144.874</b>	<b>4.603.632.058</b>	<b>87,65</b>
1.	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>25.322.400</b>	<b>23.822.300</b>	<b>94,08</b>
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.322.400	23.822.300	94,08
2.	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>3.147.396.962</b>	<b>2.925.576.236</b>	<b>92,95</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.062.962	2.875.254.636	92,84
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.134.000	4.121.600	99,70
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.200.000	46.200.000	100

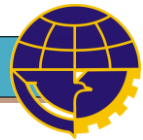




<b>3.</b>	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b>1.563.825.362</b>	<b>1.336.627.305</b>	<b>85,47</b>
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.655.362	10.184.900	87,38
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	495.921.300	413.868.054	83,45
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.231.400	238.968.000	99,06
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.072.300	27.071.650	100
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.945.000	646.534.701	82,05
<b>4.</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>207.546.800</b>	<b>127.053.020</b>	<b>61,22</b>
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.296.800	52.881.020	43,24
4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.750.000	9.672.000	46,61
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.500.000	64.500.000	100
<b>5.</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>308.053.350</b>	<b>190.533.197</b>	<b>61,86</b>
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.757.350	156.426.197	66,92
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.296.000	34.127.000	45,93
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.880.206.778</b>	<b>2.871.951.675</b>	<b>74,02</b>
<b>1.</b>	<b><i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota</i></b>	<b>76.161.112</b>	<b>56.369.400</b>	<b>74,01</b>
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	32.231.400	12.444.000	38,61
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.929.712	43.925.400	99,99
<b>2.</b>	<b><i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i></b>	<b>86.963.000</b>	<b>86.913.000</b>	<b>99,94</b>
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	86.963.000	86.913.000	99,94



	Pendukung)			
<b>3.</b>	<b><i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i></b>	<b>965.049.320</b>	<b>341.575.550</b>	<b>35,39</b>
3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	750.642.720	131.796.200	17,56
3.2	Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	214.406.600	209.779.350	97,84
<b>4.</b>	<b><i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i></b>	<b>466.473.508</b>	<b>135.704.300</b>	<b>29,09</b>
4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.530.000	-	0,00
4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000	30.933.000	28,12
4.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	104.943.508	104.771.300	99,84
<b>5.</b>	<b><i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i></b>	<b>1.913.704.838</b>	<b>1.882.425.525</b>	<b>98,37</b>
5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	27.568.000	27.559.200	99,97
5.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.449.004.723	1.424.458.725	98,31
5.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.056.015	74.410.750	99,14
5.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	313.192.700	312.546.900	99,79



5.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	48.883.400	43.449.950	88,88
<b>6.</b>	<b><i>Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i></b>	<b>79.530.000</b>	<b>76.889.550</b>	<b>97,91</b>
6.1	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	41.200.000	41.157.200	99,90
6.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	37.330.000	35.732.350	95,72
<b>7.</b>	<b><i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i></b>	<b>91.750.000</b>	<b>91.650.000</b>	<b>99,89</b>
7.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantuan Terminal	91.750.000	91.650.000	99,89
<b>8</b>	<b><i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>201.575.000</b>	<b>200.424.350</b>	<b>99,43</b>
8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	201.575.000	200.424.350	99,43
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>482.594.936</b>	<b>186.985.500</b>	<b>38,75</b>
<b>1.</b>	<b><i>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i></b>	<b>130.500.000</b>	<b>129.600.00</b>	<b>99,31</b>
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	130.500.000	129.600.00	99,31
<b>2.</b>	<b><i>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i></b>	<b>352.094.936</b>	<b>57.385.500</b>	<b>16,30</b>
2.1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	233.780.000	57.385.500	24,55
2.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	118.314.936	-	0,00



<b>JUMLAH</b>	<b>9.614.946.588</b>	<b>7.662.569.233</b>	<b>79,69</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Pengukuran kinerja organisasi dalam rangka klarifikasi capaian *output* dan *outcome* yang ditargetkan, merupakan upaya peningkatan pelayanan public dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (manajemen kinerja). Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapai hasil program dan hasil kegiatan.

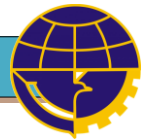
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran melalui. Berikut adalah pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2022 :

**A. SASARAN 1 : Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur, dan Laporan Kinerja/Keuangan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif), sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SASARAN 1**

PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.25.322.400,-	Rp.23.822.300,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3.097.062.962,-	Rp.2.875.254.636,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.4.134.000,-	Rp.4.121.600,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.46.200.000,-	Rp.46.200.000,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.11.655.362,-	Rp.10.184.900,-



PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.495.921.300,-	Rp.413.868.054,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.241.231.400,-	Rp.238.968.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.27.072.300,-	Rp.27.071.650,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.787.945.000,-	Rp.646.534.701,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.122.296.800,-	Rp.52.881.020,-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.750.000,-	Rp.9.672.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.64.500.000,-	Rp.65.400.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.233.757.350,-	Rp.156.426.197,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.74.296.000,-	Rp.34.127.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.5.252.144.874,-</b>	<b>Rp.4.603.632.058,-</b>
<b>REALISASI</b>		<b>87,65%</b>	

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk pencapaian SASARAN 1 yaitu "Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" adalah sebesar Rp.5.252.144.874,- dan terealisasi sebesar Rp.4.603.632.058,- atau sebesar 87,65%.

#### **B. SASARAN 2 : Meningkatkan Kapasitas Prasarana Perhubungan**

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif), sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana berikut :



**Tabel 2.3**  
**Program dan kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SASARAN 2**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp.32.231.400,-	Rp.12.444.000,-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.43.929.712,-	Rp.43.925.400,-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp.86.963.000,-	Rp.86.913.000,-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.750.642.720,-	Rp.131.796.200,-
	Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.214.406.600,-	Rp.209.779.350,-
Program Pengelolaan Pelayaran	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp.130.500.000,-	Rp.129.600.000,-
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.233.780.000,-	Rp.57.385.500,-
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp.118.314.936,-	Rp.-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.1.610.768.368,-</b>	<b>Rp.671.843.450,-</b>



PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
REALISASI		41,71%	

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk pencapaian SASARAN 2 yaitu “Meningkatnya kapasitas prasarana perhubungan” adalah sebesar Rp.1.610.768.368,- dan terealisasi sebesar Rp.671.843.450,- atau sebesar 41,71%.

### C. SASARAN 3 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif), sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SASARAN 3**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.27.568.000,-	Rp.27.559.200,-
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp.1.449.004.723	Rp.1.424.458.725
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.75.056.015,-	Rp.74.410.750,-
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.313.192.700,-	Rp.312.546.900,-



PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.48.883.400,-	Rp.43.449.950,-
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rp.41.200.000,-	Rp.41.157.200,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilai Hasil Andalalin	Rp.37.330.000,-	Rp.35.732.350,-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp.91.750.000,-	Rp.91.650.000,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Tryek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.201.575.000,-	Rp.200.424.350,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.2.285.559.838,-</b>	<b>Rp.2.251.389.425,-</b>
<b>REALISASI</b>		<b>98,50%</b>	

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk pencapaian SASARAN 3 yaitu "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan" adalah sebesar Rp.2.285.559.838,- dan terealisasi sebesar Rp.2.251.389.425,- atau sebesar 98,50%.

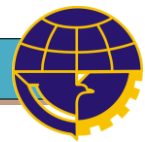
#### **D. SASARAN 4 : Menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas Darat dan Sungai**

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif), sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.5**  
**Program dan kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SASARAN 4**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Program Penyelenggaraan Lalu	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Rp.76.161.112,-	Rp.56.369.400,-





PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jalan Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.43.929.712,-	Rp.43.925.400,-
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp.1.449.004.723,-	Rp.1.424.458.725,-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp.91.750.000,-	Rp.91.650.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.1.660.845.547,-</b>	<b>Rp.1.616.403.525,-</b>
<b>REALISASI</b>		<b>97,32%</b>	

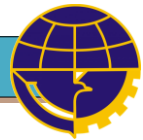
Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk pencapaian SASARAN 4 yaitu "Menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas Darat dan Sungai" adalah sebesar Rp.1.660.845.547,- dan terealisasi sebesar Rp.1.616.403.525,- atau sebesar 97,32%.

#### **E. SASARAN 5 : Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Sarana Transportasi**

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif), sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.6**  
**Program dan kegiatan Yang Mendukung Pencapaian SASARAN 5**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.251.530.000,-	Rp.-



PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.110.000.000,-	Rp.30.933.000,-
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.104.943.508,-	Rp.104.771.300,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.466.473.508,-</b>	<b>Rp.135.704.300,-</b>

Alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk pencapaian SASARAN 5 yaitu “Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Sarana Transportasi” adalah sebesar Rp.466.473.508,- dan terealisasi sebesar Rp.135.704.300,- atau sebesar 29,10%.

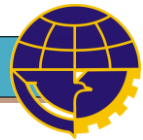
## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selain pelayanan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan pelayanan pengamanan lalu-lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin juga melayani beberapa pelayanan kepada masyarakat, di antaranya :

### 1. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Pelayanan perparkiran meliputi pemenuhan sarana dan prasarana dan pelayanan teknis lapangan. Dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ini adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

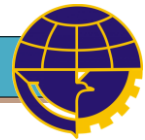


**Tabel 2.7**  
**Data Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha**  
**Tahun 2022**

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>93.600.000,-</b>	<b>47.450.000,-</b>	<b>51</b>
	- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	21.600.000,-	47.450.000,-	220
	- Retribusi pengujian kendaraan bermotor	72.000.000,-	0,-	0
<b>2.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>486.240.000,-</b>	<b>109.600.000,-</b>	<b>23</b>
	- Retribusi pemakaian kekayaan daerah	17.640.000,-	0,-	0
	- Retribusi terminal	398.000.000,-	0,-	0
	- Retribusi tempat khusus parkir	70.600.000,-	109.600.000,-	155

2. Rekomendasi Izin Trayek.

Untuk izin trayek ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin hanya berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin. Dasar hukum pelaksanaan rekomendasi izin trayek ini adalah Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



**Tabel 2.8**  
**Data Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2022**

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.000,-	250.000,-	8
	- Retribusi Izin Trayek	3.000.000,-	250.000,-	8

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

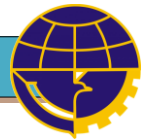
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan di tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

#### 1) Faktor Internal

- a. Tingkat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM.
- c. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yang masih kurang memadai.

#### 2) Faktor Eksternal

- a. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
- b. Peraturan perundangan terkait perhubungan dan transportasi.
- c. Kebijakan kepala daerah atau pemerintah yang lebih tinggi.
- d. Keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan, misalnya dengan Bimtek dan Diklat Teknis Bidang Perhubungan
- e. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan,



- f. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses pelayanan Dinas Perhubungan. Misalnya Satuan Lalu Lintas Polres Tapin dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan RKPD terdapat 3 program yang terdapat dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. Program Penyelenggaraan Pelayaran.

Berikut Tabel Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 :

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Pemerintahan Kab. Tapin Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kel/Desa	Rp. 51.530.000	Rp. 200.000.000			Rp. 251.530.000	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.953.200				Rp. 11.953.200	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 27.169.000				Rp. 27.169.000	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 123.735.600				Rp. 123.735.600	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 220.131.470	Rp. 741.864.800			Rp. 961.996.270	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 175.185.300				Rp. 175.185.300	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.112.000				Rp. 50.112.000	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 283.157.100				Rp. 283.157.100	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 448.462.950				Rp. 448.462.950	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.734.300				Rp. 45.734.300	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 254.943.850				Rp. 254.943.850	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 165.140.000	Rp. 398.491.500			Rp. 563.631.500	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.137.000				Rp. 60.137.000	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.326.757				Rp. 28.326.757	
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.040.000				Rp. 50.040.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.014.400				Rp. 111.014.400	

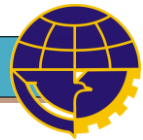
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.200.600				Rp. 200.200.600	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 134.850.000				Rp. 134.850.000	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Pabaungan Hulu. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Pabaungan Pantai. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Batalas. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Buas-buas Hilir		Rp. 3.060.000				Rp. 3.060.000	
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.268.665				Rp. 19.268.665	
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.040.000	Rp. 396.305.834			Rp. 498.345.834	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.355.000				Rp. 64.355.000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.192.640.834				Rp. 3.192.640.834	



Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.825.000				Rp. 2.825.000		
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.045.000				Rp. 86.045.000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.946.600				Rp. 10.946.600		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.782.200	Rp. 289.210.100			Rp. 339.992.300		
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 135.135.200				Rp. 135.135.200		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.110.000				Rp. 13.110.000		
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 996.150.000				Rp. 996.150.000		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 139.513.780				Rp. 139.513.780		
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.512.910				Rp. 11.512.910		
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 115.368.850				Rp. 115.368.850		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 181.910.200				Rp. 181.910.200		
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.640.000	Rp. 756.000.000			Rp. 773.640.000		
Jumlah								Rp. 7.584.127.766	Rp. 2.781.872.234			Rp. 10.366.000.000		

Kab. Tapin,.....  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. MUHAMMAD NOR, M.AP  
NIP. 197109101991011001



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan harus merupakan paduan yang selaras antara "Top Down & Bottom Up". Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tapin, untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan SKPD.

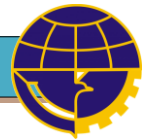
Di antara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Selain Musrenbang juga terdapat usulan dari Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Pokir DPRD) yaitu dari H. Rian Jaya (Anggota Komisi III dari PDI Perjuangan).

Berikut daftar usulan Pokir DPRD untuk kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 :

**DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024  
STATUS DILANJUTKAN**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KAMUS USULAN	PERMASALAHAN	PAGU	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )
<b>18K5J13F2 - H. M. RIAN JAYA, SE ( 5 Usulan )</b>										
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		belum ada pelabuhan/dermaga yang optimal, perlu dibangun pelabuhan/dermaga	0	masyarakat	sangat diperlukan adanya dermaga/pelabuhan	Pelabuhan/Dermaga Desa Pabaungan Hulu RT. 05 Depan Langgar Al Yakin	(Pabaungan Hulu, Kec. Candi Laras Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		belum ada pelabuhan/dermaga yang optimal, perlu dibangun pelabuhan/dermaga	0	masyarakat	sangat diperlukan adanya pelabuhan/dermaga	Pelabuhan/Dermaga Desa Pabaungan Pantai RT. 01 Depan Langgar Al Misbah	(Pabaungan Pantai, Kec. Candi Laras Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		dermaga sangat diperlukan namun belum tersedia optimal, perlu dibangun dermaga/pelabuhan	0	masyarakat	sangat diperlukan masyarakat	Pelabuhan/Dermaga Desa Pabaungan Hulu RT. 05 Depan Langgar Nurul Ihsan	(Pabaungan Hulu, Kec. Candi Laras Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		dermaga yang ada rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dibangun dermaga/pelabuhan	0	masyarakat dan peziarah	sangat diperlukan pembangunan dermaga/pelabuhan	Pelabuhan/Dermaga Desa Batalas Depan Makam Keramat Datu Muhammad	(Batalas, Kec. Candi Laras Utara)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		pelabuhan/dermaga rusak, perlu rehab total	0	masyarakat	perbaiki total dermaga	Rehab Total Pelabuhan/Dermaga RT. 004 Desa Buas Buas Hilir Kec. CLU	(Buas-buas Hilir, Kec. Candi Laras Utara)	



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi pembangunan juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi.

Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 :

# Pembangunan Nasional dalam RPJP 2005-2025

## Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:

### Dasar Regulasi :

- UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

### I RPJMN 2005 - 2009

- Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

### II RPJMN 2010 - 2014

- Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

### III RPJMN 2015 - 2019

- Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

### IV RPJMN 2020 - 2024

- TIGA KATA KUNCI:**
- Struktur Perekonomian yang Kokoh**
  - Keunggulan Kompetitif Wilayah**
  - SDM Berkualitas**

# Agenda Pembangunan Nasional Dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 (1)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Tema Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024

**Indonesia Berpenghasilan  
Menengah – Tinggi yang  
Sejahtera, Adil, dan  
Berkesinambungan**



Memperkuat Ketahanan  
Ekonomi untuk Pertumbuhan  
yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah  
untuk Mengurangi  
Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya  
Manusia yang Berkualitas dan  
Berdaya Saing



Revolusi Mental dan  
Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur  
untuk Mendukung  
Pengembangan Ekonomi dan  
Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup,  
Meningkatkan Ketahanan  
Bencana dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas  
Polhukhankam dan  
Transformasi Pelayanan Publik

# Agenda Pembangunan Nasional Dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 (2)







## Sasaran Pokok 2020-2024: SDM Berkualitas dan Berdayasaing, antara lain:



- Pelayanan Kesehatan ibu dan anak
- Konvergensi intervensi spesifik dan sensitif penurunan *stunting*
- Ketersediaan beras **37,13 juta ton**
- Ketersediaan protein hewani **2,88 juta ton**
- BOP PAUD dan Wajar 12 Tahun (KIP **20 juta** siswa dan **45,4 juta** BOS)
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- **31,4 juta** Penerima Kartu Sembako
- **10 juta** Penerima PKH
- **400 ribu** KIP kuliah dan BOPTN
- Revitalisasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menyiapkan calon **guru berkualitas**
- **2 juta** Kartu Pra Kerja per tahun
- Manajemen Talenta Nasional
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
- Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Angka Kematian Ibu menurun **183/100ribu** kelahiran hidup
- *Unmet Need* KB turun **7,4%**

- Prevalensi *Stunting* menurun menjadi **19%**
- **90%** anak usia 12-23 bulan imunisasi dasar lengkap

- **77,78%** anak kelas 1 SD/MI sudah pernah PAUD
- Perkawinan anak menurun menjadi **8,74%**

- **88,22%** anak usia 16-18 tahun menyelesaikan SMA/ sederajat
- Nilai rata-rata hasil PISA: **412,6** Membaca **396,8** Matematika **418** Sains

- **50%** pekerja pada bidang kekeahlihan menengah dan tinggi
- Penduduk dewasa obesitas tidak meningkat (**21,8%**)
- **3** medali emas olimpiade

- **94%** penduduk lansia tidak kesulitan beraktivitas
- **90%** penduduk lansia tidak kesulitan kognitif



Pembangunan Karakter: Revolusi Mental, Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Moderasi Beragama

- **10.000** perumahan prajurit
- Konsolidasi Demokrasi
- Reformasi Birokrasi
- **"Semua boleh kecuali yang dilarang"**
- Industri pertahanan dalam negeri untuk MEF dan CAD
- *Command center* dan big data untuk deteksi dini kejahatan
- Keadilan restoratif: hukuman alternatif tidak hanya pidana kurungan
- Sukses Pilkada Serentak dan Pemilu 2024

- **1 juta** rumah susun perkotaan
- **10 juta** SR Akses Air Minum Perpipaan
- **4 juta** sambungan gas RT

- Jaringan **7** pelabuhan utama
- *International Fish Market*
- **25** bandara baru
- **2.500 km** jalan tol baru

- Sistem Angkutan Umum Massal di **6** Wilayah Metropolitan

- **95%** desa terjangkau jaringan pitalebar

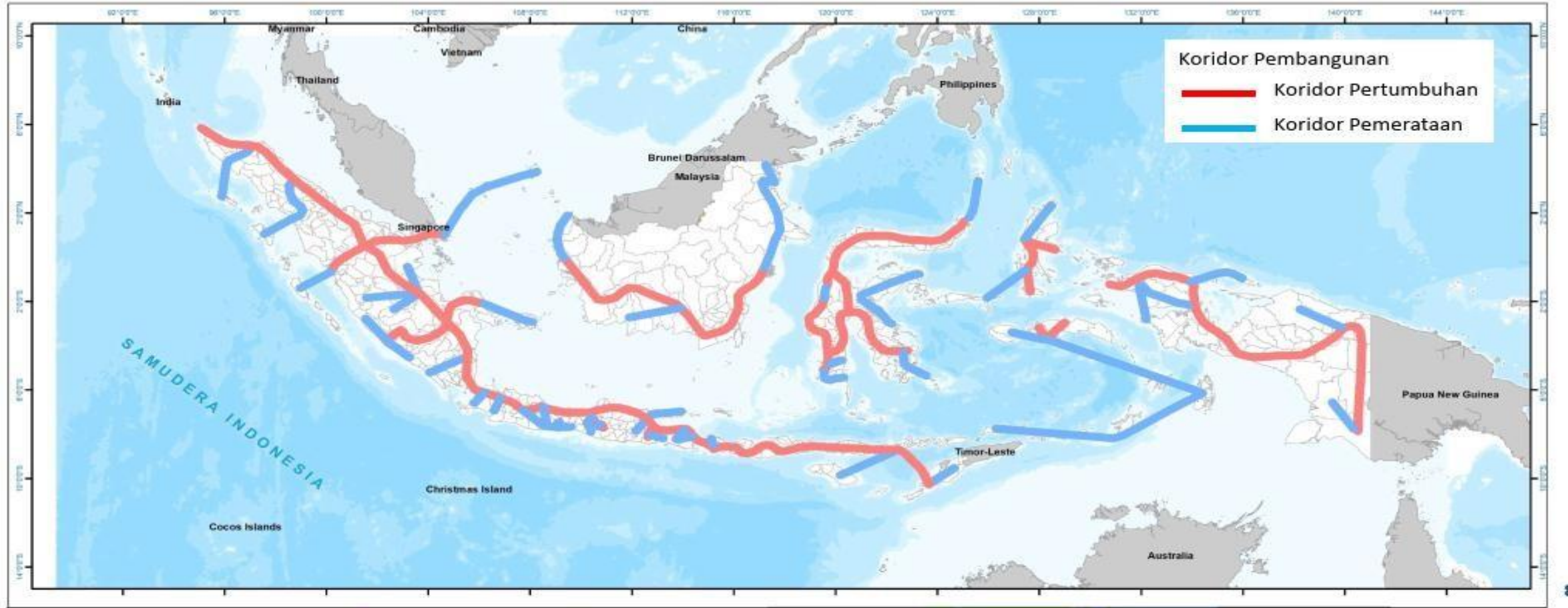
- Tambahan **21.000 MW** Pembangkit Listrik
- Tambahan **37.000 km** transmisi

- **27,3%** Penurunan Emisi GRK
- Bauran EBT menuju **23%** termasuk B30 dan B50





# KORIDOR WILAYAH RPJMN 2020-2024



# Major Project RPJMN Sektor Transportasi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 diperkuat dengan penyusunan Major Project 2020 – 2024 untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*)
- Major Project memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga

## 41 MAJOR PROJECT NASIONAL

Disusun memiliki nilai strategis dan daya ungkit untuk mencapai sasaran prioritas

Major Project mendukung sektor Transportasi dan Pengembangan Wilayah



Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Hub Terpadu



Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh – Aruk, Nunukan, Atambua, Kefamenanu, Jayapura, Merauke



Jembatan Udara dan Tol Laut Terpadu di Papua



Destinasi Pariwisata Unggulan



KA Cepat dan KA Angkutan Barang



Pemindahan Ibu Kota Negara

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran dengan tiga strategi utama:



## ALOKASI PADA PRIORITAS

- Perkuat perencanaan penganggaran berbasis *money follow program*
- Tingkatkan integrasi pendanaan untuk prioritas khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)



## KAPASITAS PENDANAAN

- Tingkatkan inovasi skema pendanaan (*creative financing*):
  - » Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
  - » Pembiayaan Inovasi
  - » Bauran pembiayaan (*blended finance*),
  - » Pembiayaan hijau (*green financing*), dan
  - » Hibah ke daerah berbasis hasil

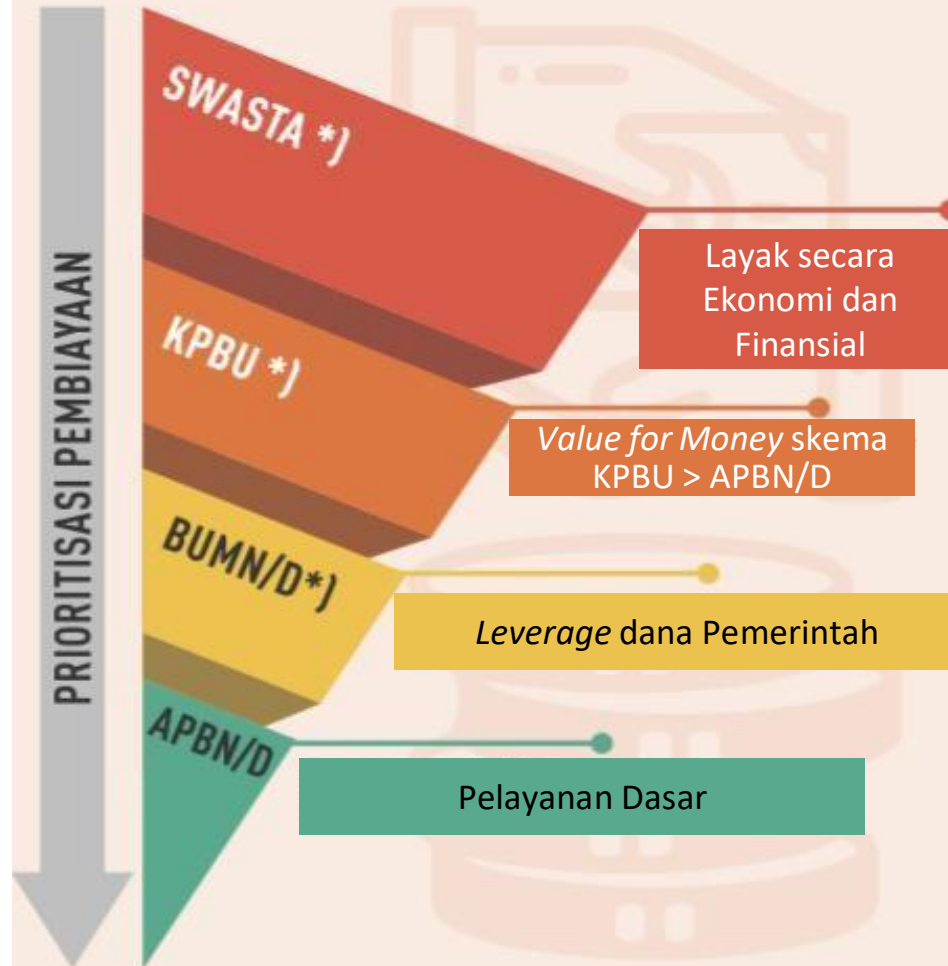


## MEKANISME IMPLEMENTASI

- Perkuat penyusunan rencana program pembangunan dan pastikan kesiapan pelaksanaan

## PARADIGMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 2020-2024

Diutamakan Pembiayaan oleh Swasta dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

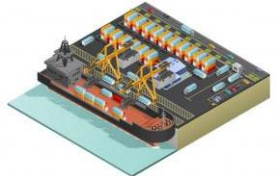


# Dukungan Kemenhub Terhadap PN 5 Dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024

## Program Prioritas



Infrastruktur  
Pelayanan Dasar



Infrastruktur  
Ekonomi



Infrastruktur  
Perkotaan



## Kegiatan Prioritas



Keselamatan dan  
Keamanan  
Transportasi



Konektivitas  
Transportasi Darat, Laut, Udara, KA



Sistem Angkutan  
Umum Massal  
Perkotaan



## Kewilayahan



11 KSPN  
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



13 KEK  
Kawasan Ekonomi Khusus



16 KI  
Kawasan Industri

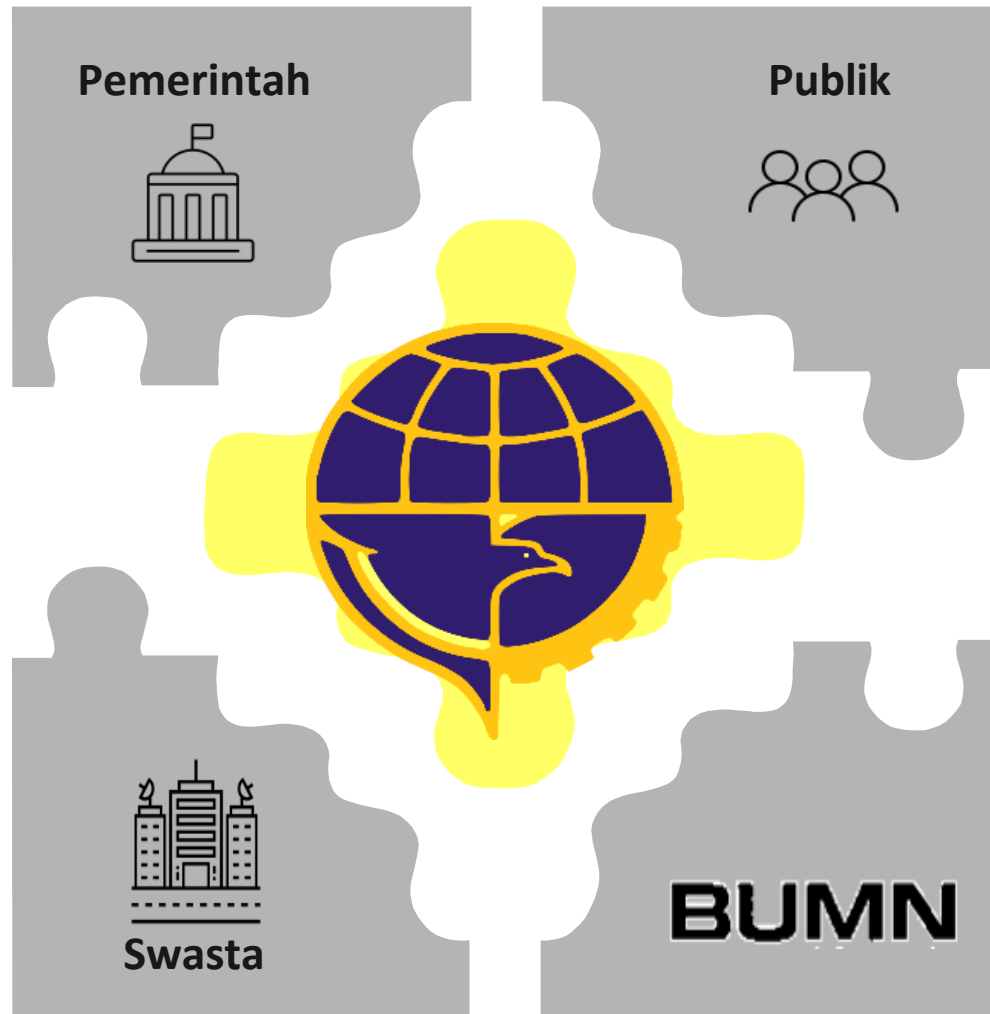


24 DTPK  
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan  
Kepulauan

15 Perkotaan di  
Indonesia\*

# Peran Aktif Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional

## Pemangku Kepentingan dan Interaksi Utama



Terdahulu	Saat ini dan Rencana Masa Depan
<p><b>Pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bertindak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui metode fiskal dan penciptaan pekerjaan</li> </ul>	<p><b>Pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi peraturan dan birokrasi</li> <li>Memfasilitasi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan <i>outcome</i> dan <i>impact</i> yang nyata</li> </ul>
<p><b>Swasta dan BUMN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih terbuka pada partisipasi swasta dalam pembangunan</li> <li>Mentalitas layanan yang diadopsi untuk memastikan kepastian rantai pasokan</li> </ul>	<p><b>Swasta dan BUMN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong secara aktif KPBU dan investasi swasta</li> <li>Mengoptimalkan pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM</li> <li><i>Public Service Obligation</i> yang tepat sasaran</li> </ul>
<p><b>Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur dan penyediaan layanan yang mengacu pada manfaat ekonomi</li> </ul>	<p><b>Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritaskan keselamatan</li> <li>Peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>Peningkatan konektivitas antar wilayah dan membangun ekosistem transportasi</li> <li>Pemenuhan arus permintaan orang keluar / masuk (mudik, Lebaran, liburan &amp; Haji)</li> </ul>

# Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Arahan Presiden Terpilih

Pembangunan  
Infrastruktur

Pembangunan  
SDM

Reformasi  
Birokrasi

Mendorong  
Investasi

Penggunaan  
APBN

### Fokus Utama Kementerian Perhubungan



Konektivitas dan  
Aksesibilitas



Tingkat  
Layanan



Keselamatan  
dan Keamanan



Pariwisata



Logistik



3T



IKN Baru

### Pendukung



Sumber Daya Manusia



Kebijakan dan Regulasi











Teknologi



Delivery Unit

# Agenda Prioritas Selama 5 Tahun Kedepan dalam mendorong percepatan pembangunan

Agenda	Fokus Prioritas	Tujuan	Tujuan 2024
 Pariwisata	 5 “New Bali” Tujuan Pariwisata Kelas Dunia	Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah	400 juta perjalanan (Wisatawan Nusantara) 26 juta orang (Wisatawan Mancanegara) 5,5% Kontribusi PDB Pariwisata
 Logistik	 7 Logistik Hub, Toll Laut, dan Perintis	Penguatan konektivitas dan daya saing ekonomi	3,5 Skor <i>Logistic Performance Index</i> 19% Biaya Logistik terhadap PDB
 3T	 Pembangunan rute jembatan udara	Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan	7,8% Pertumbuhan Ekonomi di Papua Papua 2024: 19% Kemiskinan Maluku 2024: 9,4% Kemiskinan Nusa Tenggara 2024: 13,7% Kemiskinan
 Ibu Kota Baru	 Mensukseskan Perencanaan IKN	Pengembangan sistem perkotaan dan penguatan ekonomi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan <i>hub</i> transportasi antar moda</li> <li>Mendorong adopsi dan investasi di moda transportasi hijau</li> </ul>



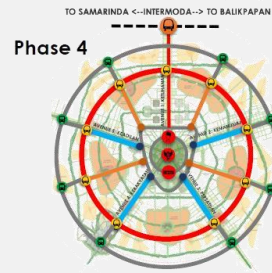
# Peran Kementerian Perhubungan untuk mendukung Ibu Kota Negara baru

## Transportasi



**Kegiatan Utama**

Pengembangan transportasi multimoda dan konektivitas antar wilayah



Hub intermoda

## Perumahan dan Jalan



Penyediaan aksesibilitas perumahan dan permukiman yang memadai dan aman



Perencanaan mengikuti *Master Plan IKN*

## TIK



Mendukung penerapan sistem transportasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi



Transportasi berbasis *Digital*

## Energi



Pengembangan transportasi hijau dan ramah lingkungan



Kendaraan Ramah Lingkungan

**Outcome**

# Dampak Pencapaian Rencana Strategis 2020-2024 terhadap Pembangunan Indonesia

## Aspirasi

*“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”* (Prioritas Nasional 5 – RPJMN 2020-2024)

## Tujuan Akhir

### Konektivitas Nasional



### Penurunan Biaya Logistik



### 5 Destinasi Pariwisata Baru Kelas Dunia



### Kinerja Layanan Perhubungan



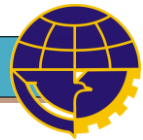
## Dampak pada Indonesia

Peningkatan pertumbuhan hingga ~6% untuk seluruh ekonomi

Peningkatan pertumbuhan tahunan hingga ~7% untuk manufaktur

Mencapai ~USD 36.5 Miliar Nilai Devisa Pariwisata

Skor 90 pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai Tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
2. Meningkatnya pengawasan dan Ppengendalian laluLintas;
3. Meningkatnya kelaikan pengoperasian sarana transportasi yang laik jalan;

### 3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024, terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 35 Sub-Kegiatan dengan nilai pagu indikatif sebesar Rp. 10.366.000.000,-.

Berikut adalah Tabel Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 :

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Pemerintahan Kab. Tapin Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Kab. Tapin, Candi Laras Selatan, Semua Kel/Desa	Rp. 51.530.000	Rp. 200.000.000			Rp. 251.530.000	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.953.200				Rp. 11.953.200	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 27.169.000				Rp. 27.169.000	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 123.735.600				Rp. 123.735.600	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 220.131.470	Rp. 741.864.800			Rp. 961.996.270	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 175.185.300				Rp. 175.185.300	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.112.000				Rp. 50.112.000	
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 283.157.100				Rp. 283.157.100	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 448.462.950				Rp. 448.462.950	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.734.300				Rp. 45.734.300	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 254.943.850				Rp. 254.943.850	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 165.140.000	Rp. 398.491.500			Rp. 563.631.500	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.137.000				Rp. 60.137.000	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.326.757				Rp. 28.326.757	
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.040.000				Rp. 50.040.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.014.400				Rp. 111.014.400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.200.600				Rp. 200.200.600	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 134.850.000				Rp. 134.850.000	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Pabaungan Hulu. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Pabaungan Pantai. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Batalas. Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Buas-buas Hilir		Rp. 3.060.000				Rp. 3.060.000	
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.268.665				Rp. 19.268.665	
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.040.000	Rp. 396.305.834			Rp. 498.345.834	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.355.000				Rp. 64.355.000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.192.640.834				Rp. 3.192.640.834	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.825.000				Rp. 2.825.000		
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.045.000				Rp. 86.045.000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.946.600				Rp. 10.946.600		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.782.200	Rp. 289.210.100			Rp. 339.992.300		
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 135.135.200				Rp. 135.135.200		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.110.000				Rp. 13.110.000		
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 996.150.000				Rp. 996.150.000		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 139.513.780				Rp. 139.513.780		
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.512.910				Rp. 11.512.910		
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 115.368.850				Rp. 115.368.850		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 181.910.200				Rp. 181.910.200		
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.640.000	Rp. 756.000.000			Rp. 773.640.000		
Jumlah								Rp. 7.584.127.766	Rp. 2.781.872.234			Rp. 10.366.000.000		

Kab. Tapin,.....  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. MUHAMMAD NOR, M.AP  
NIP. 197109101991011001





## BAB IV

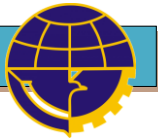
### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin dan RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran program kegiatan yang harus diimplemnetasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin maupun di lingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPD 2024-2026

**BUPATI TAPIN,**

**H.M. ARIFIN ARPAN**